

## **WOMEN IN THE LOCAL POLITICAL VORTEX: A STUDY OF WOMEN CANDIDATES INVOLVEMENT IN 2020 REGIONAL ELECTIONS IN TANAH DATAR**

**Novi Budiman**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email: novibudiman@iainbatusangkar.ac.id

Received 19 October 2022 / Revised 25 November 2022 / Accepted 18 December 2022 /

Published Online 30 December 2022

DOI: <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i2a3>

Register with CC BY NC SA License - Copyright © The Author(s), 2022.

### **Abstract**

*This study aims to describe the candidacy process and challenges of female candidates in the 2020 regional elections in Tanah Datar Regency as well as campaign issues promoted by female candidates based on gender perspective. This research is a qualitative research using candidacy theory. The findings of this study that the challenge faced by Betty Shadiq Pasadigue in the contestation of the 2020 Regional Elections of Tanah Datar Regency is the emergence of gender stereotypes and negative views of women's leadership as regional leader, although the LKAAM of Tanah Datar Regency has affirmed that women's leadership in the political field is permitted.*

### **Keywords:**

*Candidate, Gender, Local Election, Tanah Datar Regency*

## **PEREMPUAN DALAM PUSARAN POLITIK LOKAL: STUDI KETERLIBATAN KANDIDAT PEREMPUAN DALAM PILKADA 2020 DI TANAH DATAR**

**Novi Budiman**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email: novibudiman@iainbatusangkar.ac.id

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses kandidasi dan tantangan kandidat perempuan dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar serta isu-isu kampanye yang diusung oleh kandidat perempuan dalam perspektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori kandidasi. Temuan dari penelitian ini bahwa tantangan yang dihadapi oleh Betty Shadiq Pasadigue dalam kontestasi Pilkada 2020 Kabupaten Tanah Datar adalah munculnya stereotip dan pandangan negatif terhadap kepemimpinan perempuan sebagai kepala daerah, meskipun LKAAM Kabupaten Tanah Datar telah menegaskan tidak adanya larangan bagi kepemimpinan perempuan di ranah publik.*

### **Kata Kunci:**

*Kandidasi, Gender, Pilkada, Kabupaten Tanah Datar*

### **Pendahuluan**

Isu perempuan dan politik selalu menjadi topik hangat yang diperbincangkan dan diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik para akademisi, aktivis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait posisi perempuan dalam ruang publik dan politik. Perempuan selalu diposisikan subordinat jika dihadapkan dengan laki-laki dalam segala aspek. Jika dikaji secara mendalam perempuan memiliki peran yang sangat penting, misalnya dalam keluarga mereka adalah guru bagi anak-anak dan sangat menguasai urusan domestik tersebut. Persoalannya kenapa di ruang publik peran perempuan teralienasi.

Dalam konteks politik lokal, keterlibatan perempuan dalam pencalonan kontestasi Pilkada serentak tahun 2020 masih rendah. Sebagaimana data dirilis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang kini dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dari 1.432 kandidat perempuan yang mencalonkan pada tahun 2020, hanya 159 atau 11% kandidat perempuan yang lolos verifikasi pada Pilkada serentak tahun 2020 secara nasional dengan sebaran 5 orang kandidat pada tingkat

provinsi, di tingkat kota terdapat sebanyak 26 kandidat, sementara di tingkat kabupaten terdapat sebanyak 128 orang kandidat. Jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, secara keseluruhan memang menunjukkan kenaikan angka partisipasi politik perempuan, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tiga kali pelaksanaan Pilkada yang telah berlangsung. Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 terdapat sebanyak 1.140 kandidat perempuan yang ikut. Dari jumlah tersebut yang lolos verifikasi hanya sebanyak 94 orang kandidat dengan persentase 8,2%. Pada kontestasi Pilkada tahun 2017 terdapat 620 kandidat perempuan yang mencalonkan sedangkan kandidat yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya sebanyak 45 orang dengan persentase 7,3%. Sementara pada kontestasi Pilkada yang berlangsung tahun 2015, kandidat perempuan yang terlibat dalam pencalonan sebanyak 1.646 orang calon. Namun hanya 123 orang dengan persentase 7,5% yang berhasil lolos seleksi dan verifikasi.<sup>1</sup>

Salah satu fenomena yang menarik perhatian banyak kalangan pada kontestasi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tanah Datar adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak perhelatan Pilkada langsung tahun 2005, kandidat perempuan ikut berkontestasi memperebutkan kursi orang nomor satu di Kabupaten Tanah Datar. Sosok perempuan tersebut tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar, yakni adalah istri M. Shadiq Pasadigue, mantan bupati Kabupaten Tanah Datar 2 periode (2005-2015). Sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, Betty Shadiq Pasadigue, berkarir di salah satu perusahaan semen tertua di Indonesia yakni PT. Semen Padang. Di perusahaan ini Betty Shadiq Pasadigue pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Sistem dan Prosedur pada tahun 1990-1995 dan Kepala Biro Pengawasan Administrasi dan Keuangan pada tahun 1995-1999.

Setelah purna tugas dari PT. Semen Padang, Betty Shadiq Pasadigue memutuskan untuk terjun di dunia politik. Pada pemilihan legislatif tahun 2014 dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI dari Golkar untuk daerah pemilihan Sumatera Barat I dan terpilih sebagai anggota DPR-RI dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 77.663, sekaligus menempatkannya sebagai satu-satunya wakil perempuan di

---

<sup>1</sup>Muhamad Ahsan Ridhoi, "Jalan sempit Perempuan di Pilkada 2020" dalam <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fc60f93ea49a/jalan-sempit-kandidat-perempuan-di-Pilkada-2020> diakses 1 Oktober 2022.

DPR-RI dari Sumatera Barat pada saat itu. Berbekal pengalaman ini, Betty Shadiq Pasadigue memutuskan mencalonkan diri sebagai calon bupati Tanah Datar pada Pilkada tahun 2020. Betty Shadiq Pasadigue berpasangan dengan Edityawarman yang diusung oleh PAN dan PPP yang bersaing dengan 3 pasangan lainnya yakni Eka Putra-Richi Aprian (Partai Demokrat dan Gerindra), Zulfafri Darma-Sultoni (Partai Golkar dan PKS) dan Jon Enardi-Syafruddin (Hanura, Nasdem dan PDIP) untuk menjadi bupati Tanah Datar periode 2021-2024.

Hasil akhir dari Pilkada ini dimenangkan oleh pasangan Eka Putra dan Richi Aprian, sementara Betty Sadiq Pasadigue-Edityawarman menempati posisi ketiga dalam perolehan suara setelah pasangan Zulfafri Darma-Sultoni dan posisi keempat ditempati oleh pasangan Jon Enardi-Syafruddin. Meskipun Betty Shadiq Pasadigue belum mampu memenangkan kontestasi ini, namun yang menarik adalah keberanian Betty Shadiq Pasadigue untuk mencalonkan diri sebagai bupati di tengah budaya masyarakat yang masih memperdebatkan kepemimpinan perempuan sebagai kepala daerah.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka studi ini ingin menggali tentang proses kandidasi dan tantangan calon perempuan dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Menelaah latar belakang kandidat perempuan dan isu-isu kampanye yang diusung dalam perspektif gender. Dengan demikian, studi ini menekankan pada beberapa isu utama. *Pertama*, mengenai proses kandidasi dan tantangan kandidat perempuan pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. *Kedua*, telaah tentang sejauhmana isu gender terintegrasi dalam program kampanye Betty Shadiq Pasadigue sebagai kandidat perempuan.

## **Tinjauan Pustaka**

Kajian dan topik tentang perempuan dan politik bukanlah hal yang baru dalam khazanah ilmu politik. Telah banyak sarjana politik, gender dan feminisme yang mengkaji bahasan ini, dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti jurnal, buku, tesis dan disertasi. Sebagaimana studi yang dilakukan Sofa Marwah dan Oktafiani Catur Pratiwi yang mengkaji masalah representasi perempuan pada Pilkada serentak di Jawa Tengah pada tahun 2020. Dalam penelitiannya menemukan bahwa jumlah calon peserta Pilkada 2020 di Jawa Tengah mengalami penurunan. Namun ada peningkatan bupati perempuan

yang terpilih pada Pilkada 2020 dibandingkan dengan Pilkada 2015. Hal ini terlihat dari jumlah calon bupati perempuan maupun jumlah bupati perempuan terpilih. Beberapa bupati perempuan berlatar belakang *incumbent* dan kader partai. Beberapa di antara mereka juga memiliki suami atau orang tua yang pernah menjadi tokoh terkemuka daerah pemilihan. Sebagian besar bupati perempuan terpilih telah memasukkan isu gender dalam kampanye mereka. Namun perspektif gender belum secara kuat ditegaskan dalam kebijakan yang mereka usulkan. Meski berjalan lambat, kemajuan di kancah politik tetap membawa optimisme gender promosi kesetaraan.<sup>2</sup>

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Lolly Suhenti yang berjudul relevansi partisipasi politik perempuan dan keterpilihan perempuan dalam Pilkada serentak 2020. Lolly mengemukakan bahwa partisipasi politik perempuan pada Pilkada di era pandemi mengalami peningkatan, baik pemilih perempuan maupun kandidat perempuan. Begitupun korelasi pemilih perempuan dengan keterpilihan kandidat perempuan dipengaruhi adanya kesamaan perspektif perempuan, rekam jejak yang kuat, dan memiliki basis sosial yang kuat.<sup>3</sup>

Penelitian lain yang membahas masalah perempuan dan politik adalah penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Surabaya yang berjudul perempuan dan partisipasi politik perempuan pada Pilkada di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini melakukan identifikasi terhadap peran dan tingkat partisipasi perempuan di era reformasi dan kondisi objektif yang mempengaruhi peningkatan partisipasi perempuan dalam Pilkada di Jawa Timur serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan.<sup>4</sup>

Sementara Atiqotul Maula dalam penelitiannya yang berjudul perempuan dan politik dalam kontestasi Pilkada Jombang. Penelitian ini membahas tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik merupakan sebuah keniscayaan. Hasil penelitian menemukan bahwa kehadiran Munjidah Wahab sebagai putri salah seorang Ulama

---

<sup>2</sup>Sofa Marwah & Oktafiani Catur Pratiwi, "Representasi Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah: Ikhtisar Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2020" dalam *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 13, No. 1, (2022), h. 101-118.

<sup>3</sup>Lolly Suhenti, "Relevansi Partisipasi Politik Perempuan dan Keterpilihan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020" dalam *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1, No 2, (2020), h. 77-92.

<sup>4</sup>Pudji Astuti, Muhammad Arif Afandi & Refti Handini Listyani, "Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur" dalam *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol.12, No 2 (2019), h. 184-195.

terkemuka di Jombang merubah paradigma berfikir kaum laki-laki yang bias gender untuk memberikan ruang kepada perempuan dalam dunia politik agar dapat berperan lebih strategis dan optimal.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Choirul Salim, mengangkat masalah dinamika politik perempuan pada Pilkada di Provinsi Lampung. Choirul Salim menemukan bahwa dinamika politik perempuan di Provinsi Lampung sangat dipengaruhi faktor figur, komunikasi politik dan basis masa yang dimiliki. Para kandidat perempuan juga mampu mematahkan stereotip selama ini yang sering menganggap perempuan belum mampu bersaing dengan laki-laki.<sup>6</sup>

Penelitian Qodarsasi dan Dewi mengkaji upaya peningkatan elektabilitas calon bupati perempuan pada Pilkada Kudus tahun 2018. Temuan dalam penelitian ini adalah salah satu strategi yang dilakukan calon perempuan Sri Hartini dalam memenangkan kontestasi yakni dengan cara penggunaan identitas dan isu perempuan. Sri Hartini memfokuskan pada isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. Hal ini ia tampilkan dengan merepresentasikan dirinya sebagai perempuan yang mandiri dan berdaya serta mampu bersaing dengan laki-laki. Ia yakin mampu berjaya di Kudus karena jumlah perempuan di Kudus lebih banyak daripada laki laki.<sup>7</sup>

Berangkat dari pelacakan literatur yang dilakukan, maka studi tentang keterlibatan perempuan dalam kontestasi Pilkada 2020 di Kabupaten Tanah Datar belum ada yang melakukan penelitian. Kajian ini sangat menarik, mengingat masuknya perempuan dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Tanah Datar yang terkenal dengan *luhak nan tuo* yang merupakan daerah tempat lahirnya kebudayaan Minangkabau yang terkenal dengan budaya matrilineal (garis keturunan ibu) yang menjunjung tinggi nilai filosofis adat dan agama yang dikenal dengan “*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*” yang artinya adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah SWT.

---

<sup>5</sup>Atiqoyul Maula, “Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada Jombang” dalam *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 6, No. 1 (2016), h. 241-272.

<sup>6</sup>Choirul Salim, “Dinamika Politik Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada di Provinsi Lampung” dalam *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3, No. 2 (2016), h. 287-305.

<sup>7</sup>Umi Qodarsasi & Nevy Rusmarina Dewi, “Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018” dalam *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 11, No. 1 (2019), h. 225-244.

## Tinjauan Pustaka

### *Kandidasi*

Dalam setiap kali pesta demokrasi, baik Pilpres, Pileg dan Pilkada seringkali kita mendengar istilah kandidasi. Kandidasi merupakan proses merangkul dan menyeleksi orang-orang yang memiliki kompetensi yang dilakukan oleh partai politik untuk ditempatkan pada posisi tertentu dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada. Pada posisi ini partai politik memiliki peran yang sangat menentukan, maka kecenderungannya, banyak faktor yang akan dipertimbangkan oleh partai politik dalam melakukan proses kandidasi ini, misalnya peluang perolehan suara, modalitas sosial, politik dan ekonomi, ketokohan kandidat dan lain sebagainya.

Menurut Richard E. Matland ada tiga tahapan penting dalam proses kandidasi. *Pertama*, seleksi diri. Hal ini berkaitan dengan keinginan kandidat untuk terikat dengan sistem politik serta mendapat pengakuan terhadap eksistensi dirinya dalam jabatan publik. Pada tahap ini kandidat *running for office*. *Kedua*, seleksi partai politik. Pada tahap ini, partai politik akan melakukan seleksi terhadap kandidat. Pola seleksi yang dilakukan oleh partai politik akan berbeda sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh partai politik tersebut yang harus diikuti oleh kandidat. Secara teoritis terdapat dua bentuk seleksi kandidat oleh partai politik, yaitu: 1) *Patronage oriented system* merupakan proses seleksi yang tidak berdasarkan kewenangan legal formal, di mana aturan dan kewenangannya tidak jelas serta lebih menekankan pada loyalitas kepada partai politik. 2) *Bureaucratic oriented system*, pola seleksi ini menekankan pada aturan yang jelas dan detail, memiliki standarisasi dan eksplisit. Pada tahapan seleksi partai politik ini, penilaian dan pertimbangan tim seleksi akan sangat menentukan terhadap kandidat yang layak mengikuti kontestasi. *Ketiga*, pemilihan. Di mana kandidat yang telah ditetapkan akan dipilih oleh konstituen dan ini adalah tahapan terakhir dari proses kandidasi.<sup>8</sup>

Sementara itu dalam pandangan Pippa Norris, proses kandidasi atau rekrutmen dibagi menjadi tiga tahapan, yakni: *Pertama*, kandidat yang memenuhi kelengkapan administrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada seperti undang-undang

---

<sup>8</sup>Richard E. Matland, "Echancing Women`s Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral System" dalam Julie Ballington & Azza Karam, *Women in Parlemen: Beyon Numbers, A Revised Edition* (Stockholm: International IDEA, 2005), h. 1-5.

Pemilu atau aturan partai yang berlaku. *Kedua*, nominasi atau ketersediaan posisi atau jabatan sesuai dengan persyaratan dan adanya permintaan dan usulan dari partai politik terkait siapa yang akan dipilih menjadi kandidat. *Ketiga*, pemilihan. Tahapan ini adalah tahapan terakhir, di mana kandidat yang telah ditetapkan akan dipilih oleh pemilih.<sup>9</sup>

### *Gender dan Politik*

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hellen, ia mencoba membedakan karakteristik manusia berdasarkan pada definisi sosial dan budaya yang berpijak pada perbedaan biologis.<sup>10</sup> Sementara Ann Oakley mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial yang digunakan pada manusia untuk dibangun oleh budaya manusia itu sendiri. Artinya menurut Ann gender bukan perbedaan karakteristik manusia berdasarkan aspek biologis yang bersifat ilahiah dan kodrati.<sup>11</sup>

Dari pengertian di atas, konsepsi tentang gender dapat dipahami sebagai perbedaan perilaku antara kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Selain itu, gender bukan ketentuan yang bersifat ilahiah melainkan telah dikonstruksi oleh manusia itu sendiri melalui proses sosial dan budaya yang telah berproses sejak lama dalam waktu yang sangat panjang. Namun dalam prakteknya, terjadi kerancuan dalam memahami konsepsi gender. Gender seringkali dianggap sebagai pemaknaan yang bersifat biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender kemudian melahirkan ketidakadilan gender.<sup>12</sup>

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan di antaranya adalah; *Pertama*, marginalisasi perempuan merupakan proses peminggiran dan pembatasan ruang gerak terhadap kaum perempuan untuk eksis dalam berbagai bidang, seperti di perusahaan, lembaga pemerintahan, panggung politik, kebijakan publik dan lainnya. Lahirnya marginalisasi terhadap kaum perempuan disebabkan oleh beberapa faktor seperti budaya patriarhi, sifat primordial dan adat istiadat dari

---

<sup>9</sup>Pippa Norris, "Recruitment" dalam Richard S. Katz & William J. Crotty, *Handbook of Party Politics* (London: Sage, 2006), h. 90.

<sup>10</sup>Rasyidin, *Politik Gender Aceh: Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2020), h. 24-27.

<sup>11</sup>Rasyidin & Fidhia Aruni, *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 7.

<sup>12</sup>Rian Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi 1998-2002* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 39.

lingkungan masyarakat yang sudah terkonstruksi sejak lama. Secara tidak langsung marginalisasi ini akan melahirkan keterbelakangan, kebodohan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan.

*Kedua*, subordinasi perempuan. Dalam konteks ini perempuan dianggap tidak memiliki posisi penting di dalam masyarakat. Posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Hal ini disebabkan oleh konstruksi sosial dalam suatu masyarakat tertentu yang menganggap kaum perempuan lemah, emosional, dan tidak rasional, sehingga tidak cocok menjadi pemimpin. Memimpin adalah tugas yang hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki.

*Ketiga*, stereotip adalah prasangka atau pelabelan negatif terhadap kaum perempuan. Prasangka atau pelabelan tersebut merupakan hasil konstruksi sosial. Seperti perempuan tidak boleh bekerja, perempuan tidak terlibat dalam kegiatan politik, perempuan tidak boleh menjadi wanita karir, perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi dan lainnya. Prasangka ini kemudian memunculkan tindakan diskriminatif dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

*Keempat*, beban kerja. Tugas utama perempuan dalam anggapan masyarakat secara umum adalah mengurus rumah tangga. Sementara kaum laki-laki diposisikan tidak memiliki peran tersebut. Beban kerja domestik yang dilakukan oleh perempuan ini dianggap pekerjaan yang bernilai rendah. Sementara pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki dianggap sebagai pekerjaan yang bernilai tinggi. Beban kerja ini kemudian menempatkan perempuan sebagai kelas nomor dua setelah kaum laki-laki. Hal ini memperlihatkan tindakan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Fenomena ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan, memicu gelombang tuntutan kesetaraan gender dalam segala bidang dari kalangan aktivis feminis antara laki-laki dan perempuan. Namun sampai saat ini, secara konseptual kesetaraan gender merupakan sebuah konsep yang masih *debatable* terkait pemaknaan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Ada yang berasumsi bahwa kesetaraan gender berkaitan kesamaan hak dan kewajiban antara kaum laki-laki dan perempuan.

Dalam pandangan UNDP, kesetaraan gender diidealkan sebagai kesetaraan yang berimbang. Asumsinya adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keharusan dan

kesukaan yang sama dalam semua bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik.<sup>13</sup> Sementara menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan, kesetaraan gender adalah kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan dan hankamnas, serta menikmati hasil pembangunan tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>14</sup> Maksudnya bahwa peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data yang mana tujuannya adalah bukan untuk mengetahui realitas tunggal, akan tetapi realitas majemuk sehingga pada pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya.<sup>15</sup>

Dalam mendeskripsikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang dijadikan sebagai dasar untuk membedah masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang diperoleh dari informan kunci yang terkait dengan masalah penelitian ini melalui wawancara. Sementara itu data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat dan memperkaya khazanah dalam penelitian ini seperti buku, artikel, dokumen, jurnal dan sumber lainnya.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara serentak, dalam hal ini seorang peneliti tidak dapat melaksanakan kegiatan penelitian secara terpisah, peneliti dituntut bergerak secara interaktif mulai dari pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data lapangan yang telah diperoleh, kemudian hasil reduksi data

---

<sup>13</sup>Supartiningsih, "Peran Ganda Perempuan: Sebuah Analisis Filosofis Kritis" dalam *Jurnal Filsafat*, Vol. 13, No. 1 (2003), h 42-54.

<sup>14</sup>Affifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), h.157.

<sup>15</sup>Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 10.

disajikan dalam bentuk narasi yang dapat diambil simpulan. Selanjutnya simpulan-kesimpulan diperkuat dan dilakukan verifikasi sampai berakhirnya penelitian.

### **Dinamika Proses Kandidasi Calon Perempuan di Tanah Datar**

Kandidasi merupakan salah kunci yang dilakukan oleh partai politik menjelang proses Pilkada. Kandidasi adalah sebuah proses pemilihan individu atau pasangan yang dianggap memiliki kompetensi oleh partai politik yang akan diusung untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada. Kandidasi adalah proses politik awal dalam Pilkada, hal inilah yang kemudian menyebabkan kandidasi menjadi krusial, mengingat setiap individu yang akan mencalonkan diri dalam kontestasi harus mendapat rekomendasi dan restu dari partai politik minimal 20% perolehan kursi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Pilkada. Oleh karena itu dukungan partai politik merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada.

Menjelang bursa pencalonan Pilkada Tanah Datar tahun 2020 dibuka beberapa nama yang dianggap berpeluang sebagai kandidat bupati seperti Irdinansah Tarmizi, Zulfadri Darma, Sultoni, Dt. Intan Bano, Saidani, Betty Shadiq Pasadigue, Febby Dt. Bangso, Richi Aprian, Wahyu Irawana Putra, Indra Gunalan, Irman dan lainnya. Berdasarkan hasil survey Liberte Institute pada tanggal 4-8 Oktober 2019 dari beberapa nama kandidat yang muncul, lima nama yang dianggap memiliki peluang besar maju dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Dalam survey Liberte Institute tersebut menempatkan petahana Irdinansyah Tarmizi yang paling berpeluang dengan hasil survey sebanyak 53%. Kemudian diikuti oleh Betty Shadiq Pasadigue dengan persentase sebanyak 20,1%, Zulfadri Darma sebanyak 17,75%, Arkadius Dt. Intan Bano sebanyak 8,09% dan terakhir adalah Febby Dt. Bangso sebanyak 1,2%.<sup>16</sup>

Dinamika bursa pencalonan bupati Kabupaten Tanah Datar mengalami perubahan, Irdinansyah Tarmizi yang sebelumnya telah mendeklarasikan maju dalam Pilkada 2020 yang berpasangan dengan Richi Aprian, mundur dari bursa pencalonan karena alasan kesehatan. Mundurnya Irdinansyah Tarmizi mengubah peta bursa

---

<sup>16</sup>Maylis Yusuf, "Hasil survey Elektabilitas Calon Bupati Tanah Datar 2020" dalam <https://www.realitakini.com/2019/10/hasil-survey-elektabilitas-calon-bupati.html>, diakses 21 Oktober 2022.

pencalonan Pilkada Kabupaten Tanah Datar. Nama-nama baru kemudian muncul seperti Eka Putra, Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Setelah berakhirnya proses penjaringan bakal calon oleh partai politik, maka KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan empat pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020. Adapun keempat pasangan calon tersebut adalah pasangan Zulfadri Darma-Sultoni yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, Jon Endardi-Syafruddin yang diusung oleh tiga partai politik yakni Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan Eka Putra-Richi Aprian diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Pasangan keempat adalah Betty Shadiq Pasadigue-Edityawarman yang diusung oleh PAN dan PPP. Berikut data pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Datar pada Pilkada 2020.

Tabel. 1  
*Pasangan Calon dan Partai Pengusung Pada Pilkada Kabupaten Tanah Datar 2020*

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi
1	Zulfadri Darma-Sultoni	Golkar dan PKS	9 Kursi
2	Jon Enardi-Syafruddin	Nasdem, Hanura dan PDIP	8 Kursi
3	Eka Putra-Richi Aprian	Demokrat dan Gerindra	10 Kursi
4	Betty Shadiq Pasadigue - Adityawarman	PAN dan PPP	8 Kursi

*Sumber: KPU Kabupaten Tanah Datar, 2020.*

Masuknya Betty Shadiq Pasadigue sebagai satu-satunya kandidat perempuan dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tanah Datar secara tidak langsung mempengaruhi konfigurasi politik lokal di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya dalam sejarah Pilkada langsung di Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2005, tampil calon perempuan untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di Kabupaten Tanah Datar dan sekaligus mematahkan dominasi kaum laki-laki yang selama ini mendominasi dalam bursa pencalonan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Fenomena ditetapkannya Betty Shadiq Pasadigue-Edityawarman sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh PPP dan PAN telah

memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah faktor-faktor apa yang mendorong dan menyebabkan Betty Shadiq Pasadigue diusung menjadi calon bupati. Studi ini akan mencoba untuk menjelaskan dan mengkaji dengan menggunakan teori kandidat Matland. Menurut Matland terdapat tiga tahapan penting yang menentukan seorang kandidat dipilih sebagai kandidat yang akan diusung oleh partai politik yaitu seleksi diri, seleksi partai dan pemilihan.<sup>17</sup>

Betty Shadiq Pasadigue merupakan salah seorang politisi perempuan yang berasal Sumatera Barat. Sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, Betty Shadiq Pasadigue pernah bekerja di PT. Semen Padang, salah satu perusahaan Semen tertua di Indonesia. Sepak terjangnya dalam panggung politik tidak bisa dilepaskan dari pengaruh suaminya M. Shadiq Pasadigue, bupati Kabupaten Tanah Datar dua periode, 2005-2010 dan 2010-15. Karir politik Betty Shadiq Pasadigue dimulai saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI dari Partai Golkar di Dapil I Sumatera Barat. Meskipun sebagai pendatang baru pada Pileg tahun 2014, Betty Shadiq Pasadigue mampu memperoleh suara tertinggi dengan perolehan suara sebanyak 77.663 dan sekaligus menempatkannya sebagai anggota DPR-RI perempuan yang berasal asal Sumatera Barat satu-satunya.

Setelah masa jabatannya berakhir sebagai anggota DPR-RI di tahun 2019, Betty Shadiq Pasadigue banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan sosial khususnya masalah ketahanan keluarga yang pernah dibidangnya saat menjadi anggota DPR-RI. Pada saat bursa pencalonan bupati Kabupaten Tanah Datar mencuat ke permukaan, Betty Shadiq Pasadigue digadang-gadang sebagai salah satu kandidat yang kuat. Betty Shadiq Pasadigue memiliki modalitas sosial dan politik yang kuat untuk maju. Namun berbagai isu dan polemik terkait kedudukan perempuan sebagai kepala daerah masih mengundang pro-kontra dan perdebatan dari berbagai kalangan terutama terkait kepemimpinan perempuan dalam perspektif adat dan agama. Sementara itu belum ada keputusan adat dan agama yang secara eksplisit menjelaskan kedudukan perempuan sebagai pemimpin khususnya sebagai kepala daerah. Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya berbagai tafsiran bias gender berbagai corak dan bentuk yang melemahkan kaum perempuan.

---

<sup>17</sup>Richard E. Matland, *Loc.Cit.*

Polemik yang berkembang memunculkan suasana ketidakpastian dari keluarga Betty Shadiq Pasadigue. Pada prinsipnya pihak keluarga merestui pencalonan Betty Shadiq Pasadigue selama tidak bertentangan dengan nilai dan norma dan prinsip-prinsip adat di Minangkabau. Untuk menjawab keraguan tersebut pihak keluarga mempertanyakan hal tersebut kepada pemangku otoritas adat yakni Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Tanah Datar terkait apakah secara adat perempuan dibolehkan atau tidak menjadi kepala daerah. M. Shadiq Pasadique mengatakan bahwa apapun keputusan yang dikeluarkan oleh LKAAM akan diterima sebagai sebuah konsekuensi adat bagi pihak keluarga.<sup>18</sup>

Mengantisipasi polemik yang berkepanjangan terkait posisi kepemimpinan perempuan, para pemangku adat di LKAAM merespon surat keluarga Betty Shadiq Pasadigue bahwa adat tidak melarang perempuan menjadi pemimpin politik. Artinya sah-sah saja perempuan menjadi kepala daerah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Namun dalam kepemimpinan adat (pemangku adat) perempuan tidak dibolehkan, karena dalam ketentuan adat menyatakan bahwa pemangku adat harus laki laki sesuai dengan filosofi orang Minangkabau, *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*.<sup>19</sup> Keputusan adat tersebut menjadi pijakan politik bagi Betty Shadiq Pasadigue untuk mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Tanah Datar. Keseriusan Betty Shadiq Pasadigue dalam bursa pencalonan bupati ini terlihat dari intensitas komunikasi dan pendekatan yang dibangun dengan berbagai partai politik. Bahkan hampir seluruh partai politik yang membuka pendaftaran, Betty Shadiq Pasadigue memasukan berkas pencalonan dan mengikutinya sampai tahapan akhir.<sup>20</sup>

Memasuki fase akhir proses pendaftaran bakal calon, bursa pencalonan terus mengalami perubahan, Partai Demokrat yang sebelumnya tidak memiliki kandidat yang diusung tiba-tiba mengusung kadernya, Eka Putra, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat sebagai bakal calon bupati. Begitu juga Partai Golkar yang mengusung Zulfadri Darma, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar dan sekaligus petahana wakil bupati Kabupaten Tanah Datar. Meskipun peluang masih terbuka pada dua partai tersebut namun atas pertimbangan etika politik, Betty Shadiq Pasadigue

---

<sup>18</sup>M. Shadiq Pasadique, Mantan Bupati Tanah Datar 2005-2015, *wawancara*, 30 Juni 2022.

<sup>19</sup>H. Aresno Dt. Andomo, Ketua LKAAM Kabupaten Tanah Datar, *wawancara*, 8 Agustus 2022.

<sup>20</sup>Rahmad Dani Putra, Tim LO Pasangan Betty Shadiq Pasadique, *wawancara*, 2 Juli 2022.

lebih memilih jalin komunikasi dan pendekatan yang lebih intens dengan PAN dan PPP yang memiliki peluang lebih besar karena kedua partai ini belum memiliki kader yang akan diusung dalam Pilkada. Kekuatan koalisi dua partai ini telah memenuhi persyaratan ambang minimal pencalonan Pilkada.<sup>21</sup>

Setelah mengikuti proses seleksi dari tim seleksi DPD PAN dan DPC PPP Kabupaten Tanah Datar, Betty Shadiq Pasadigue dan Edityawarman direkomendasikan oleh tim seleksi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Direkomendasikannya Betty Shadiq Pasadigue dan Edityawarman sebagai calon telah sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kedua partai pengusung. Di samping itu, pertimbangan lainnya adalah dari sekian banyak calon yang mendaftar di PAN, Betty Shadiq Pasadigue dan Edityawarman dianggap paling siap untuk mengikuti kontestasi Pilkada. Hal ini dilihat dari sisi modalitas sosial dan politik, elektabilitas, *track record* dan lainnya yang dimiliki. Dengan semua indikator ini terbuka peluang untuk dapat memenangkan kontestasi Pilkada.<sup>22</sup>

Sementara itu, Pimpinan Cabang PPP menilai, disamping memiliki kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan oleh partai, Betty Shadiq Pasadigue dan Edityawarman merupakan perpaduan pasangan yang komplit antara politisi dan mantan birokrat. Menurut Arianto, komposisi pasangan ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan stabil di Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu, pertimbangan lainnya adalah Betty Shadiq Pasadigue dapat dipersonifikasikan sebagai representasi kaum perempuan. Dari sisi kuantitas pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki, hal ini secara tidak langsung akan berdampak secara elektoral.<sup>23</sup>

Meskipun pasangan Betty Shadiq Pasadigue dan Edityawarman telah mendapatkan rekomendasi dari DPD PAN dan DPC PPP Kabupaten Tanah Datar sebagai calon yang akan diusung dalam Pilkada, namun pencalonan ini harus menunggu keputusan dari pimpinan pusat masing-masing partai. Kewenangan DPD PAN dan DPC

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Irman, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kab. Tanah Datar Periode 2015-2020, *wawancara*, 19 Agustus 2020.

<sup>23</sup>Arianto, Ketua DPC Partai Pesatuan Pembangunan Kab. Tanah Datar, *wawancara*, 16 Agustus 2022.

PPP hanya sebatas melakukan proses penjaringan. Sementara kewenangan untuk memutuskan siapa yang akan ditetapkan sebagai calon yang akan diusung merupakan kewenangan dan hak prerogatif pimpinan pusat partai.<sup>24,25</sup>

### **Isu-isu Kampanye Kandidat Perempuan dalam Perspektif Gender**

Sebagai representasi kaum perempuan dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tanah Datar, perhatian dan keberpihakan Betty Shadiq Pasadigue terhadap kaum perempuan dapat dilihat dari program-program yang ditawarkan dalam program kampanyenya. Keberpihakan Betty Shadiq Pasadigue terhadap kaum perempuan tergambar dari visi yang diusungnya, yakni Visi “Kabupaten Tanah Datar terdepan dalam proses pelayanan di segala bidang serta mewujudkan ketahanan keluarga menuju masyarakat yang sejahtera, berbudaya, berkeadilan, beriman dan bertaqwa”.

Salah satu isu yang menarik tentang perempuan dalam visi Betty Shadiq Pasadigue adalah masalah ketahanan keluarga. Dalam pandangan Betty Shadiq Pasadigue, ketahanan keluarga merupakan dasar dan pilar dalam membangun Kabupaten Tanah Datar yang sejahtera dan maju. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Menurut M. Shadiq Pasadique, dari keluargalah awal sebuah generasi terbentuk. Itu sebabnya bangunan sebuah keluarga harus kuat agar mampu menghasilkan generasi tangguh. Ketangguhan keluarga ditentukan oleh landasan pembangun keluarga. Landasan pembangun itu menurut M. Shadiq Pasadique adalah aqidah. Aqidah Islam yang menjadi dasar pemikiran semua anggota keluarga, yang akan menguatkan ketahanan keluarga tersebut. Ketahanan keluarga akan melahirkan kemandirian nilai, kesalehan sosial dan kemandirian ekonomi.<sup>26</sup>

Ketahanan keluarga merupakan salah satu pilar ketahanan masyarakat dan bangsa, masalah keluarga tidak bisa dibebankan pada seorang anggota keluarga semata seperti masalah religi, edukasi, proteksi, ekonomi, sosialisasi, afeksi, reproduksi

---

<sup>24</sup>Istajib, Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2020 Kab. Tanah Datar Pasangan Calon Betty-Edytiawarman, *wawancara*, 7 Juli 2022.

<sup>25</sup>Arianto, *Loc. Cit.*

<sup>26</sup>M. Shadiq Pasadique, *Loc. Cit.*

dan rekreasi. Hal ini mustahil dapat diwujudkan oleh masing-masing keluarga tanpa adanya peran besar negara atau pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah diharapkan menyediakan seluruh perangkat dan prasarana agar setiap individu dan setiap keluarga mampu memerankan fungsi-fungsinya secara ideal, tanpa gangguan dan tidak tumpang tindih. Fungsi ekonomi misalnya, bisa berjalan bila negara menopangnya dengan memberikan pendidikan untuk menjelaskan siapa saja pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pemerintah memfasilitasi program dan sarana pelatihan agar individu terampil bekerja, membuka lapangan kerja, memberi kemudahan permodalan dan pengembangan usaha. Negara bahkan dituntut menghapus semua praktik kecurangan di dunia usaha. Karenanya, mengatasi kerapuhan keluarga yang dipicu faktor kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan mendorong lebih banyak kaum ibu (perempuan) untuk bekerja. Justru kebijakan ini akan berlawanan dengan perwujudan fungsi keluarga yang lain yang melibatkan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dalam bidang ekonomi, Betty Shadiq Pasadigue menawarkan program pemberdayaan kaum perempuan melalui program perempuan pahlawan ekonomi dan program pengembangan potensi komunitas UMKM perempuan secara berkelanjutan. Menurut Betty Shadiq Pasadigue program ini akan dapat memaksimalkan peran keluarga. Para perempuan (istri) tidak hanya mengandalkan suami tetapi istri juga harus bisa berperan aktif. Program ini bertujuan agar para perempuan khususnya ibu rumah tangga untuk dapat lebih produktif dan mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Untuk mewujudkan hal ini para ibu (perempuan) harus diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan dalam bidang ekonomi.<sup>27</sup>

### **Tantangan Kandidat Perempuan**

Tantangan dan hambatan bagi perempuan dalam jabatan publik dan politik sampai saat ini masih menjadi persoalan. Kondisi ini tergambar dalam proses perebutan kekuasaan pada tingkat lokal melalui Pilkada. Dari 13 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat hanya satu kandidat

---

<sup>27</sup>Rahmad Dani Putra, *Loc. Cit.*

perempuan yang ikut berpartisipasi dalam proses pencalonan yakni Betty Shadiq Pasadigue sebagai calon bupati Kabupaten Tanah Datar yang berpasangan dengan Edityawarman.

Meskipun pencalonan perempuan ini sudah dikuatkan dengan keputusan adat mengingat yang dikeluarkan oleh LKAAM Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak ada larangan secara adat untuk masuknya perempuan dalam kepemimpinan publik dan politik. Namun bukan berarti dalam proses pemilihan kandidat perempuan dapat melenggang dengan mulus tanpa hambatan. Berbagai isu-isu miring dan negatif terhadap perempuan seringkali dihembuskan sebagai bentuk penolakan dan gugatan terhadap peran perempuan dalam ranah publik dan politik. Perempuan dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin, bahkan diksi-diksi yang dikeluarkan sangat memojokkan perempuan, seperti apakah kita sudah kehabisan stok laki-laki untuk jadi pemimpin atau kita harus berimam kepada perempuan dan lainnya.<sup>28</sup>

Kondisi yang sama juga dirasakan oleh Rahmad Dani Putra bahwa stereotip terhadap kepemimpinan perempuan seringkali dihembuskan seperti politik bukanlah urusan perempuan, perempuan hanya pantas di rumah, perempuan itu emosional dan perempuan itu lemah dan lainnya. Isu-isu gender ini sejak awal sudah diprediksi akan terjadi. Berbagai langkah untuk mengantisipasi isu gender tersebut mulai dengan meminta LKAAM Kabupaten Tanah Datar untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dengan cara berdiskusi dengan lintas tokoh seperti pemuka adat, pemuka agama, dan melakukan sosialisasi dengan cara *door to door* kepada masyarakat untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada larangan secara adat dan agama terkait kepemimpinan perempuan sebagai kepala daerah.<sup>29</sup>

Hasil akhir Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar hanya menempatkan pasangan Betty Shadiq Phasadigue dan Adytawarman pada posisi ketiga dalam perolehan suara setelah pasangan Zuldafri Darma dan Sultoni dan pasangan Jon Enardi dan Syafruddin di posisi keempat. Sementara yang keluar sebagai pemenang dalam Pilkada tersebut adalah pasangan Eka Putra dan Richi Aprian. Meskipun Betty Shadiq Pasadigue belum mampu memenangkan kontestasi Pilkada ini, paling tidak menjadi

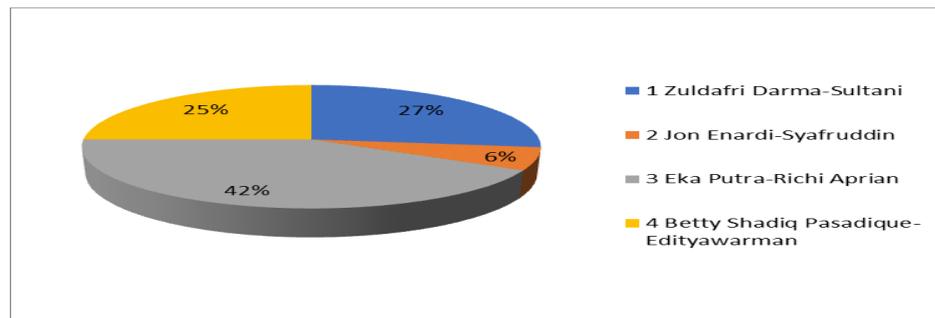
---

<sup>28</sup>Istajib, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup>Rahmad Dani Putra, *Loc. Cit.*

pelajaran penting yang dapat diambil untuk mendorong penguatan politik kaum perempuan di Kabupaten Tanah Datar.<sup>30</sup> Berikut adalah hasil rekapitulasi perolehan suara.

Gambar 1.  
*Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Tanah Datar*



Sumber: Diolah dari laporan Pilkada KPU Tanah Datar, 2020.

## Kesimpulan

Berdasarkan teori kandidasi maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses kandidasi melewati tiga tahapan yaitu: Pertama, *self selection*. Munculnya keberanian Betty Shadiq Pasadique sebagai calon perempuan untuk ikut bertarung dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 didukung oleh modalitas sosial dan politik yang dimilikinya. Dari sisi modalitas sosial terlihat dari mengalirnya dukungan dari berbagai kalangan masyarakat untuk pencalonan Betty Pasadique sebagai bupati Tanah Datar. Dukungan ini tidak terlepas efek kedekatan personal yang telah dibangun oleh suaminya M. Sadiq Pasadique, mantan bupati Kabupaten Tanah Datar. Sementara dari sisi modalitas politik, Betty Shadiq Pasadique pernah menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Sumatera Barat.

Kedua, *party selection*. Pada tahap ini partai politik pengusung menilai Betty Shadiq Pasadique sebagai calon yang memiliki track record yang baik dan sangat berpeluang untuk memenangkan kontestasi Pilkada. Ketiga, pada tahap akhir kandidasi adalah *election*. Dalam tahap pemilihan tantangan yang dihadapi oleh Betty Shadiq Pasadique dalam kontestasi Pilkada 2020 Kabupaten Tanah Datar adalah munculnya

<sup>30</sup>Istajib, *Loc. Cit.*

stereotip dan pandangan negatif terhadap kepemimpinan perempuan sebagai kepala daerah, meskipun isu tersebut sejak awal sudah diantisipasi dengan keluarnya keputusan LKAAM Kabupaten Tanah Datar yang menegaskan tidak adanya larangan bagi kepemimpinan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Astuti, Pudji, Muhammad Arif Afandi & Refti Handini Listyani. “Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur” dalam *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol.12, No 2 (2019), h. 184-195.
- Marwah, Sofa & Oktafiani Catur Pratiwi. "Representasi Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah: Ikhtisar Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2020" dalam *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 13, No. 1, (2022), h. 101-118.
- Matland, Richard E. “Echancing Women`s Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral System” dalam Julie Ballington & Azza Karam. *Women in Parlemen: Beyon Numbers, A Revised Edition*. Stockholm: International IDEA, 2005.
- Maula, Atiqoyul. “Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada Jombang” dalam *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 6, No. 1 (2016), h. 241-272.
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Norris, Pippa. “Recruitment” dalam Richard S. Katz & William J. Crotty. *Handbook of Party Politic*. London: Sage, 2006.
- Nugroho, Rian. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Qodarsasi, Umi & Nevy Rusmarina Dewi.”Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018” dalam *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 11, No. 1 (2019), h. 225-244.
- Rasyidin & Fidhia Aruni. *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Rasyidin. *Politik Gender Aceh: Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2020.

Salim, Choirul. “Dinamika Politik Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada di Provinsi Lampung” dalam *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3, No. 2 (2016), h. 287-305.

Suhenti, Lolly. “Relevansi Partisipasi Politik Perempuan dan Keterpilihan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020” dalam *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1, No 2, (2020), h. 77-92.

Supartiningsih. “Peran Ganda Perempuan: Sebuah Analisis Filosofis Kritis” dalam *Jurnal Filsafat*, Vol. 13, No. 1 (2003), h 42-54.

### **Website**

Ridhoi, Muhamad Ahsan. “Jalan sempit Perempuan di Pilkada 2020” dalam <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/analisisdata/5fc60f93ea49a/jalan-sempit-kandidat-perempuan-di-Pilkada-2020> diakses 1 Oktober 2022.

Yusuf, Maylis. “Hasil Survey Elektabilitas Calon Bupati Tanah Datar 2020” dalam <https://www.realitakini.com/2019/10/hasil-survey-elektabilitas-calon-bupati.html>, diakses 21 Oktober 2022.

### **Wawancara**

Arianto, Ketua DPC Partai Pesatuan Pembangunan Kab. Tanah Datar, *wawancara*, 16 Agustus 2022.

H. Aresno Dt. Andomo, Ketua LKAAM Kabupaten Tanah Datar, *wawancara*, 8 Agustus 2022.

Irman, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kab. Tanah Datar Periode 2015-2020, *wawancara*, 19 Agustus 2020.

Istajib, Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2020 Kab. Tanah Datar Pasangan Salon Betty-Edytiawarman, *wawancara*, 7 Juli 2022.

M. Shadiq Pasadigue, Mantan Bupati Tanah Datar 2005-2015, *wawancara*, 30 Juni 2022.

Rahmad Dani Putra, Tim LO Pasangan Betty Shadiq Pasadigue, *wawancara*, 2 Juli 2022.